

**PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM SELEKSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)  
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**Jurusan Ilmu Politik**

**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**

**Universitas Andalas**

**2018**

## **ABSTRAK**

**IQBAL UTAMA YAHYA (1310831024) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang 2018, Judul Skripsi: Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIB) di Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016.**

**Pembimbing I: Drs. Syaiful, M.Si, dan Pembimbing II: Dewi Anggraini, S.IP, M.Si**

Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016 menempatkan pejabat melalui proses seleksi jabatan. Seleksi jabatan di tuntut untuk mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka atau transparansi di lingkungan Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance yang menjelaskan tentang proses keterbukaan informasi kepada publik agar publik bisa mengakses dan mendapatkan informasi dari setiap kebijakan pemerintah. Transparansi mempunyai empat prinsip yaitu adanya kebijakan yang terbuka terhadap fungsi pengawasan, adanya akses keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintahan, berlakunya prinsip check and balance dan mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarnisasi dari semua proses. Disamping pemerintah harus transparan terhadap seleksi jabatan, adanya politisasi birokrasi yang menyebabkan kurangnya transparan dalam penetapan pejabat yang sudah melakukan seleksi. Politisasi birokrasi yang terjadi dalam seleksi jabatan menjadi sebuah masalah dalam keterbukaan informasi sebab ketika dalam 3 besar seleksi yang menyisakan pejabat, keputusan dari pimpinan daerah menjadi sangat berpengaruh terhadap penempatan. Hak prokratif seorang pimpinan daerah menghilangkan kajian transparansi dalam seleksi yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi publik dalam penempatan pejabat. Hasil yang ditemukan dilapangan adalah didalam proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Tanah Datar sudah sangat transparan namun kurang sempurna dikarenakan hasil nilai dalam 3 besar sebelum penempatan tidak di publikasikan. Hal ini terjadi karena pengaruh dari politisasi dalam seleksi jabatan dimana kepala daerah tidak melihat hasil nilai yang di dapat tetapi melihat loyalitas terhadap pimpinan untuk menunjang visi dan misi kepala daerah.

**Kata kunci :Transparansi, Seleksi Jabatan dan Politisasi Birokrasi**

## ABSTRACT

**IQBAL UTAMA YAHYA (1310831024) Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences Andalas University, Padang 2018, Thesis Title: Implementation of the Principle of Transparency in the Selection of High Leadership Position Pratama (echelon IIB) in the Government of Tanah Datar 2016.**

**Supervisor I: Drs. Syaiful, M.Si, and Supervisor II: DewiAnggraini, S.IP, M.Si**

Implementation of the selection of senior high-ranking office in Tanah Datar Regency in 2016 put the officials through the process of job selection. Selection of office is demanded to refer to the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform No. 13 of 2014 on the procedures for filling the top positions openly or transparently in the Tanah Datar regency that aims to create good governance. Transparency is one of the principles of good governance that explains the process of information disclosure to the public so that the public can access and obtain information from every government policy. Transparency has four principles, namely the existence of policies that are open to supervisory functions, access to information disclosure so that people can reach every aspect of government policy, enactment of check and balance principles and mechanisms to ensure a system of openness and standardization of all processes. Besides the government must be transparent to the selection of office, the politicization of the bureaucracy that causes the lack of transparency in the determination of officials who have made the selection. Bureaucracy politicization that occurs in the selection of positions becomes a problem in information disclosure because when in the 3 big selection that leaves officials, the decision of the regional leaders to be very influential on the placement. The progressive right of a regional leader removes a transparency study in selection that requires public information disclosure in the placement of officials. Results found in the field is in the selection process of high leadership position in Tanah Datar is very transparent but less perfect due to the results of the value in the big 3 before the placement is not published. This occurs because of the influence of politicization in the selection of positions in which the head of the region does not see the results of the value that can but see the loyalty to the leadership to support the vision and mission of the head of the region.

**Keywords : Transparency, Job Selection and Bureaucratic Politicization**

